

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam intitusi ekonomi dan sebagai penggerak dinamika ekonomi suatu daerah. Pasar sendiri memiliki arti sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari jenisnya pasar dibagi menjadi dua yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan usaha kecil dan modal kecil dengan proses tawar menawar.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *mall*, *hypermarket*, *supermarket*, *departemen store*, *shopping center*, *mini market* yang pengelolanya dilaksanakan secara modern, pasar ini lebih mengutamakan pelayanan dan kenyamanan saat berbelanja dengan manajemen yang berada pada satu tangan, bermodal kuat dan di lengkapi label harga yang pasti.¹ Dengan kata lain perbedaan pasar modern dan pasar tradisional hanya terletak pada manajemen yang diberlakukan, biasanya pasar tradisioanal diperuntukkan bagi pedagang menengah kebawah sehingga nantinya masyarakat dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah, sedangkan pasar modern biasanya diperuntukkan bagi pedagang menengah atas yang memiliki modal usaha besar.

Realitanya, perkembangan pasar modern saat ini lebih berkembang pesat dibandingkan dengan pasar tradisional. Pasar tradisional ada di tengah masyarakat dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau dan kondisi pasar yang

¹ Permendagri no 42 th 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

seadanya, sebaliknya pasar modern hadir di masyarakat dengan konsep yang lebih menarik yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan saat berbelanja, tak sampai disitu pasar modern saat ini juga hadir lebih dekat dengan masyarakat, hal ini dapat membuat keinginan untuk kembali berbelanja di pasar modern daripada ke pasar tradisional.

Pada dasarnya pasar tradisional memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian nasional, selain menjadi pondasi dasar perekonomian, pasar tradisional juga mampu digunakan untuk memaksimalkan hasil bumi yang dikelola oleh para petani. Keberadaan pasar tradisional saat ini harus diperhatikan guna menyambut era globalisasi, jika tidak maka pasar tradisional akan terlupakan dengan keberadaan pasar modern. Pasar tradisional juga terdapat beberapa jenisnya, salah satu yang akan di bahas disini adalah pasar desa. Pasar desa merupakan pasar tradisional yang di kelolah oleh pemerintah atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan yang di sekitar lokasi pasar, dan barang yang di jual belikan di pasar desa meliputi kebutuhan pokok sehari-hari bagi desa atau kelurahan tersebut.

Pasar desa Kejapanan merupakan satu-satunya pasar desa yang berada di desa Kejapanan kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Pasar ini dulunya milik orang gogol yang merupakan pemilik sawah sedesa Kejapanan. Dulunya semua pekerjaan kampung akan diserahkan oleh desa kepada orang gogol seperti krocoan, bersih bersih desa dan lain sebagainya, sehingga orng gogol yang berjumlah 16 orang pada saat itu bersepakat untuk mengumpulkan hasil sawah irisan yang hasilnya di bagi bagi untuk dibelikan tanah dan diserahkan pada desa, hal ini dilakukan agar pekerjaan desa tidak lagi di berikan pada orang gogol. Pada awalnya pasar ini disebut pasar krempyeng, yang merupakan lokasi jual-beli antar ikan dan sayuran. Pada tahun 1963 desa Kejapanan yang saat itu dipimpin oleh kepala desa Abu Bakar Joyorejo meresmikan dan mengubah nama pasar krempyeng menjadi pasar desa Kejapanan. Setelah diresmikan menjadi pasar desa Kejapanan, pasar ini beralih fungsi sebagai pasar desa yang menyediakan

keperluan hidup sehari-hari yakni sembilan kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat.

Letak pasar desa Kejapanan ini berada di 50 meter dari jalan raya utama Surabaya-Malang. Lokasi ini sangat strategis karena lokasinya bangunannya masuk kedalam yang memudahkan transportasi untuk akses menuju pasar desa Kejapanan ini. Pada awalnya pasar desa ini dirancang untuk menampung kurang lebihnya 260 pedagang saja, namun dengan seiring waktu dan perkembangan penduduk mengakibatkan kenaikan pada jumlah pedagang pasar desa Kejapanan, hingga saat ini pedagang yang terdaftar menjadi pedagang desa Kejapanan hingga mencapai 476 pedagang, jumlah ini belum termasuk jumlah keseluruhan pedagang di pasar desa Kejapanan. Jumlah pedagang pasar Kejapanan yang melebihi daya tampung lokasi pasar utama sehingga membuat pedagang memilih untuk berjualan di bahu jalan. Keadaan ini di perburuk dengan tidak adanya lahan parkir, sehingga para pedagang lebih memilih memarkirkan kendaraan mereka di area pasar dan sepanjang jalan yang dirasa lebih dekat dengan kios mereka. Hal tersebut memicu terjadinya kemacetan disepanjang jalan sekitar wilayah pasar desa. Terlebih lagi pada pagi hari pada jam berangkat sekolah, karena terdapat sarana pendidikan di sekitar lokasi pasar desa membuat kemacetan menjadi parah dan sulit untuk di hindari.

Mengacu pada kondisi pasar desa Kejapanan yang semakin lama semakin mengalami penurunan kualitas nyaman dan juga kebersihannya, pemerintah setempat berunding untuk mencari jalan keluar dari masalah yang di timbulkan ini, sehingga pemerintah memutuskan untuk merelokasi pasar desa Kejapanan dan membangun pasar desa ke lokasi baru. Penentuan lokasinya pemerintah mengadakan perundingan sehingga tercapai kesepakatan bahwasannya lokasi pasar baru akan di bangun diatas tanah “bengkok” desa yang terletak tidak jauh dari lokasi pasar desa yang sebelumnya.

Tanah “bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah ini tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan

oleh mereka yang di beri hak mengelolanya. Dana pembangunan pasar baru desa Kejapanan berasal dari investor dikarenakan tidak ada anggaran untuk pembangunan pasar baru dari pemerintah setempat. Upaya ini di lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pasar desa Kejapanan dalam segi keamanan, kenyamanan dan juga kualitas aktivitas lainnya di dalam pasar baik bagi penjual maupun pembeli dan masyarakat pada umumnya. Selain itu pemerintah juga bertujuan untuk merevitalisasi fungsi jalan kabupaten guna memperlancar arus kendaraan, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan khususnya tingkat *play group*, taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Diharapkan nantinya setelah pemindahan lokasi pasar desa Kejapanan ini dapat mengurangi kemacetan dan juga meningkatkan pendapatan asli desa Kejapanan.

Dalam proses relokasi ini tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Ada sebagian pedagang yang mau menerima keputusan pemerintah setempat untuk pindah ke lokasi baru yang telah di tentukan dan ada pula yang menolak keputusan pemindahan lokasi pasar. Mereka yang menolak keputusan pemerintah ini bergabung dalam paguyuban pedagang pasar desa Kejapanan. Paguyuban ini menolak dengan tegas pemindahan pasar desa, menurut mereka pasar desa Kejapanan hanya butuh perbaikan dan tidak perlu adanya pemindahan lahan. Selain itu setelah tanah “bengkok” sudah dalam proses pembangunan, investor yang seharusnya mendanai pembangunan pasar baru desa Kejapanan melarikan diri akibat ketidakmampuan investor untuk mendanai keseluruhan pembangunan pasar baru desa Kejapanan. Hilangnya investor ini menambah panjangnya kerja pemerintah desa, karena pemerintah desa harus mulai lagi mencari investor baru dan juga pemerintah harus melalui proses hukum akibat pembatalan kontrak dengan investor lamanya.

Pasar desa seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena merupakan salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu pasar desa hadir di tengah masyarakat untuk mempertahankan budaya lokal sehingga sudah seharusnya pasar tradisional

khususnya pasar desa dipertahankan dan dilestarikan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pusat pembelanjaan modern.

Penelitian sejenis yang berkaitan dengan konflik yang terjadi pada proses pembangunan maupun relokasi pasar. Siti Musrifah (2015) dalam penelitiannya tentang dinamika dan konflik dalam proses relokasi pedagang pasar Ngabul kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, hasil penelitian Siti Musrifah menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan keluarga pewakaf tanah di pasar lama mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, konflik ini akan berdampak pada proses pemindahan pedagang pasar desa ngabul. Selain itu dampak ekonomi sosial yang dirasakan adalah semakin eratnya hubungan antara masyarakat dan pedagang pasar lama maupun pasar darurat. Penelitian Siti Musrifah memfokuskan pada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan keluarga pewakaf tanah pasar lama serta masyarakat sekitar, dan juga peneliti ini memfokuskan pada dampak sosial ekonomi yang terjadi. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada konflik yang terjadi dalam proses relokasi pasar desa Kejapanan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Alfian Nurrochman (2015) dalam penelitiannya tentang konflik kepentingan dalam pembangunan pasar besar Tuban di kabupaten Tuban, hasil penelitian ini menunjukkan adanya konflik politik yang terjadi dalam pembangunan pasar besar tuban sehingga mengakibatkan pasar tuban belum beroperasi hingga saat ini. Konflik ini terjadi antara pihak swasta atau kontraktor dan subkontraktor dengan pemerintah setempat. Penelitian Alfian Nurrochman lebih memfokuskan pada konflik yang terjadi antara pemerintah dengan pihak swasta. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat serta pedagang pasar dalam relokasi pasar di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Dari uraian mengenai proses relokasi pedagang pasar desa Kejapanan diatas peneliti tertarik untuk meneliteli dan mempelajari lebih jauh mengenai proses relokasi pedagang pasar di desa Kejapanan dalam penelitian yang berjudul

KONFLIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PROSES RELOKASI PASAR DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam analisis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur elite yang ada di desa Kejapanan?
2. Apa saja yang menjadi sumber konflik relokasi pasar desa Kejapanan?
3. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam relokasi pasar desa Kejapanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui struktur elite yang ada di desa Kejapanan
2. Untuk mengetahui sumber konflik yang ada dalam proses pembangunan relokasi pasar desa Kejapanan
3. Untuk mengetahui dinamika yang terjadi pada pembangunan pasar baru desa Kejapanan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini secara akademis diharapkan bisa bermanfaat sebagai bentuk kajian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui dinamika dan konflik dalam pembangunan pasar baru desa Kejapanan, dan juga diharapkan dapat menjadi acuan pada peneliti yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca dan juga peneliti lainnya sebagai bahan referensi mengenai dinamika dan konflik yang ada dalam relokasi pasar desa Kejapanan. Dan diharapkan juga sebagai evaluasi terhadap penerapan relokasi pasar sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintahan setempat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori utama dan teori pendukung, teori utama yang di gunakan adalah teori konflik milik Ralf Dahrendorf digunakan untuk menganalisis data tentang konflik yang ada. Selain itu peneliti juga meneliti tentang elite-elite yang ada di desa Kejapanan, sehingga peneliti juga menggunakan teori elite milik Suzzan Keller.

1.5.1 Teori Konflik

Pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan ada permasalahan yang akan terus terjadi dan akan mudah untuk diatasi yakni permasalahan keadilan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selalu disambut baik oleh semua pihak, dalam hal ini akan ada selalu pihak-pihak yang merasa memperoleh keuntungan dan juga semua pihak yang akan memandang hal tersebut akan merugikan, dari pihak-pihak inilah yang nantinya akan menjadi pihak yang akan memulai konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir di dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang berarti konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.

Istilah konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau antar kelompok dimana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau kepercayaan bahwa aspirasi semua pihak yang tidak berkonflik tidak dicapai secara simultan.² Pada hakekatnya tidak satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik, baik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lainnya.

Teori konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Teori konflik memandang masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian posisi tertentu didalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi masyarakat lainnya. Menurut Dahrendorf, masyarakat tidak mungkin ada tanpa adanya konflik dan konsensus yang merupakan persyaratan bagi masing-masing pihak, jadi masyarakat tidak mungkin berkonflik kecuali terjadi konsensus sebelumnya.

Teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Selain itu, teori konflik membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda, yang nantinya akan menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan superordinasi dan subordinasi inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan didalamnya.

Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan dapat mengendalikan bawahannya. Artinya mereka dapat menempati posisi otoritas atau penguasa karena harapan orang lain yang berada disekitar mereka bukan dari ciri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, mereka tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol ditentukan didalam masyarakat. Otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Saat kekuasaan merupakan tekanan (*coersive*) satu sama lain,

² Pruitt&Rubin dalam Novri Susan. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. (Jakarta: Kencana. 2010)

kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini menjadi legitimate dan oleh sebab itu, dapat dilihat sebagai hubungan “*authority*”, dimana beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lainnya. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan dan kekuatan, sedangkan otoritas sendiri adalah kekuasaan yang telah mendapatkan pengakuan secara umum.

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menepatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap strukturnya. Sifat dari wewenang adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Pada buku Dahrendorf menyebutkan bahwa masyarakat adalah persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Oleh karenanya kekuasaan akan selalu memisahkan antara penguasa dan yang di kuasai secara tegas sehingga di dalam masyarakat akan selalu ada dua golongan yang saling bertentangan. Golongan-golongan yang saling bertentangan ini akan dipersatukan oleh ikatan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung. Pertentangan itu terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha untuk mempertahankan status quo, sedangkan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan.

Pertentangan kepentingan ini selalu ada di setiap waktu dan setiap struktur yang ada. Hal ini menyebabkan kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam dari golongan yang anti status quo. Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan selalu dinilai objektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu bersandingan dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan tersebut. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara yang berlaku dan diharapkan oleh golongannya.

Kekuasaan bukanlah suatu fasilitas untuk melaksanakan fungsi didalam atas nama masyarakat selaku sebuah sistem, tetapi semata-mata diinterpretasikan sebagai sebuah fasilitas untuk mendapatkan apa yang diperoleh satu kelompok

tertentu, yakni oleh pemegang kekuasaan yang ingin mencegah kelompok lain yang ingin pula mendapatkan apa yang diinginkan.³

Menurut Lewis A Coser, konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukannya, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian yang dapat memberikan peran positif atau dapat memberikan peran negatif dalam masyarakat. Coser membagi konflik menjadi dua tipe, konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik merupakan konflik yang memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah, konflik ini timbul diakibatkan adanya kekecewaan terhadap semua tuntutan yang terjadi dalam hubungan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan hubungan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan, konflik tipe non realistik merupakan konflik yang terjadi akibat didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama, konflik antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Konflik non realistik ini bukan berasal dari berbagai tujuan yang antagonis, akan tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan paling tidak dari salah satu pihak. Dari kedua tipe konflik tersebut Coser mengungkapkan bahwasannya konflik realistik merupakan konflik yang sangat sulit untuk dicapai resolusinya.

Suatu analisis sosiologi yang telah dilakukan dengan sangat jelas oleh Charles W. Mills, dalam risetnya tentang struktur kekuasaan di Amerika (*The Power Elite*. 1956). Mills tidak sekuat tentang dua hubungan konflik yang hanya terdiri dari dimensi ekonomi, dia lebih sekuat pendapat Weber tentang terbaginya stratifikasi sosial kedalam tiga dimensi yakni dimensi ekonomi, dimensi prestis, dan dimensi politik. Mills melihat hubungan konflik yang menandai hubungan dominasi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor politik.

³ Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta; CV. Rajawali (hlm. 206).

Riset yang dilakukan terhadap struktur kekuasaan Amerika, Mills mendapati suatu hubungan dominatif, dimana struktur sosial dikuasai oleh elite, dan rakyat adalah pihak yang ada dibawah kontrol politisinya. Hubungan ini muncul karena elite-elite berusaha memperoleh dukungan politis rakyat demi kepentingan mobilitas vertikal mereka secara ekonomi maupun secara politik. Elite-elite tersebut adalah militer, politisi, dan pengusaha. Para elite kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk kaya, baik diperoleh melalui investasi atau duduk dalam posisi eksekutif. Mereka yang termasuk kedalam elite kekuasaan seringkali akan pindah dari satu bidang yang posisinya tinggi dalam bidang yang lainnya.

1.5.1.2 Faktor penyebab konflik

Sosiolog memandang bahwa masyarakat akan selalu dalam perubahan dan setiap elemen masyarakat selalu ikut andil dalam terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya ketidak seimbangan antara hubungan manusia dalam aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. Faktor faktor yang dapat menyebabkan konflik menurut Soerjono Soerjono⁴, antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan memungkinkan adanya bentrok antar mereka, terlebih lagi jika perbedaan tersebut melibatkan diri mereka masing-masing

2. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung dari pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit atau banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Hal ini juga akan menyebabkan pertentangan antar kelompok.

⁴ Soerjono Soekanto , 2006: 91-92

3. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, kepentingan yang dimaksud ini dapat berupa kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan kepentingan yang lainnya.

4. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat dan ini dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang memiliki perbedaan pendirian. Sebagaimana yang diketahui perubahan sosial akan mengakibatkan terjadinya disorganisasi pada suatu struktur.

1.5.2 Teori Elite Politik

Elite berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi, dengan kata lain elite adalah sekelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat yang lainnya, sehingga menempati kekuasaan sosial diatas warga masyarakat lainnya⁵. Perbedaan yang tak mungkin terelakkan diantara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya beberapa kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lainnya dalam lingkungan masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang memiliki keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam kelompok yang dikenal sebagai kelompok elite, keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok

⁵ Suzzane Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, peranan Elite Penentu dalam Masyarakat modern*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995 hlm 33

elite yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat yang lainnya yang tidak memiliki keunggulan.

Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller, dan pemikir yang tergolong dalam elite teoritis, memang menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.⁶ Struktur masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang yang menjadikannya masyarakat *heterogeneous*, maka didampingi eksistensi pusat kekuasaan umum (*rulling elite*), maka dalam entitas masyarakat tersebut juga akan tumbuh elite strategis, yakni pusat-pusat kekuasaan khusus yang secara natural muncul didalamnya. Hal ini berdampak pada timbulnya fenomena yang dinamai sebagai solidaritas organis, dimana pusat kekuasaan umum (*rulling elite*) tidak lagi dapat berhubungan dan berkomunikasi secara langsung dengan tiap-tiap anggota masyarakat, tetapi harus berkomunikasi dengan organ-organ atau golongan-golongan kecil dalam masyarakat itu sendiri, dimana organ-organ tersebutlah yang dinamakan sebagai pusat kekuasaan khusus atau elite strategis (Keller 1963). Keller membagi masyarakat menjadi dua kategori : Pertama, kelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan, dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah dan mereka disebut elite berkuasa dengan elite yang tidak berkuasa. Kedua, sejumlah massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elite yang berkuasa jumlahnya *relative* sedikit, mereka yang memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka yang memegang fungsi politik akan memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya dengan tujuan yang baik ataupun dengan tujuan yang tidak baik. Selain itu, terdapat elite yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapisan kedua dalam strata kekuasaan elite, kelompok ini akan menjadi pengganti elite di atasnya jika sewaktu-waktu elite pemegang kekuasaan

⁶ Haryanto, Kekuasaan Elite; Suatu Bahasan Pengantar, PLOD-JIP Fisipol UGM; Yogyakarta, 2005, hal 66

kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, atau dengan kata lain kelompok elite ini akan dapat menjadi tandingan apabila elite yang berkuasa tidak mampu untuk menjalankan tugas mengendalikan kekuasaan.

Dalam entitas masyarakat, yakni bentuk dari mayoritas individu-individu yang dipimpin oleh elite, mereka memiliki cara untuk menciptakan mekanisme seleksi dan imbalan terhadap minoritas yang memimpin, atau elite. Cara tersebut digunakan untuk memahami struktur ‘pemimpin’ dalam entitas masyarakat tersebut, Keller membagi tipe kepemimpinan sosial sebagai berikut.

1. Kasta Penguasa

Kasta penguasa lebih mengacu pada kepemimpinan sosial yang bersifat permanen, dimana kasta penguasa hanya dapat didapatkan melalui kelahiran (keturunan), dan melepaskan kasta penguasa hanya melalui kematian. Lapisan ini menjalankan tugas sosial yang paling penting, dimana mereka membina masyarakat melalui reproduksi biologis, serta memiliki prestise yang tinggi. Kasta penguasa terbentuk terpisah dengan agama, kekerabatan, bahasa, daerah tempat tinggal, kedudukan dan ekonomi serta jabatan.

2. Aristokrasi

Aristokrasi terbentuk atas ikatan-ikatan keluarga, baik melalui kekerabatan maupun kekayaan. Aristokrasi mewakili minoritas yang berada diatas dan terpisah dari entitas masyarakat lainnya, dimana mereka memiliki tanda etiket dan pandangan yang khusus.

3. Estate Pertama

Estate pertama mengacu pada bentuk atau lapisan dalam masyarakat yang ditentukan secara legal, serta memiliki sistem politik yang terpusat. Untuk dapat memasuki lapisan ini, maka harus melalui pelaksanaan pembuatan, pembelian, pengangkat, maupun perkawinan. Sehingga sebagai konsekuensi logis, maka status estate pertama dapat hilang dan diperoleh. Mereka yang masuk kedalam golongan ini akan menjalankan hampir semua atau kebanyakan dari kunci fungsi-fungsi kemasyarakatan.

4. Kelas Penguasa

Keller mengacukan penjelasannya pada sebuah lapisan tunggal yang dibebankan sebagai fungsi sosial yang penting. Dalam tipe ini, faktor keturunan tidak memiliki kesempatan yang besar untuk dapat masuk kedalam kelas penguasa. Faktor yang lebih menentukan untuk dapat masuk kedalam lapisan kelas penguasa ini adalah kepemilikan dan kekayaan, baik bersifat keturunan (dibawah dari lahir), maupun kepemilikan dan kekuasaan yang dicapai melalui usaha. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa untuk memasuki kelas penguasa, faktor kekuasaan ekonomi lebih memiliki pengaruh yang besar daripada kekuatan politik.

5. Elite-elite Penentu

Dalam elite-elite penentu, terdapat beberapa lapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, serta menyediakan orang-orang untuk posisi-posisi sosial yang terkemuka. Fungsi-fungsi sosial yang ada di dalam masyarakat diperluas dan mengalami spesialisasi oleh karenanya, mereka yang menempati posisi ini akan dibina secara khusus sesuai dengan tugas-tugas mereka. Singkatnya elite-elite penentu adalah spesialis istimewa yang melalui seleksi secara kompetensi ketat secara perorangan. Awal mula elite penentu, sebagaimana yang terdapat pada keadaan kelompok-kelompok berkuasa, yakni terletak pada sifat heterogenitas yang terkandung dalam masyarakat baik dalam hal usia, jenis kelamin, kesukaan, kecakapan, kekuatan, dan sebagainya. Secara sederhana dapat dipahami sebagai pembeda antara elite penentu dengan kelas sosial, dimana kelas sosial memiliki asal-usul yang terletak pada pembagian kerja dalam masyarakat.

Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni: (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, dan (4)

perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elite akan semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom.⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menafsirkan serta menggambarkan keadaan sesuai dengan kenyataan yang diperoleh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menafsirkan serta menggambarkan keadaan sesuai dengan kenyataan yang sudah diperoleh. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Dalam menggunakan pendekatan tersebut diharapkan peneliti juga dapat mendeskripsikan kejadian dan kenyataan yang sebenar-benarnya tentang hal-hal yang diteliti. Untuk itu data yang diperoleh dapat diuraikan lebih jelas sehingga pembaca dapat lebih jelas dan lebih mudah memahami hasil penelitian.

Alasan peneliti dalam memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan sehingga data yang terkumpul nantinya akan lebih mudah di baca dan di interupsi.

⁷ Op Cit, Suzzane Keller, hal 87

1.6.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber penelitian ini biasanya akan disebut sebagai informan atau narasumber. Dari informan ini kita akan dapat berbagai informasi terkait dengan judul Relokasi Pasar Desa Kejapanan studi kasus konflik masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan pasar desa Kejapanan. Ketika melakukan penelitian sebaiknya penulis mengetahui siapa saja dan apa saja yang akan menjadi subjek penelitian, serta peneliti dituntut untuk melakukan pengenalan terhadap subjek penelitian tersebut (harison, 27:86).

Subjek penelitian, pada penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan proses relokasi pasar baru desa Kejapanan seperti pemerintah desa dan panitia penyelenggara program relokasi pasar desa Kejapanan, selain itu ada pula pihak-pihak yang mengalami konflik dengan pemerintah atas relokasi pasar baru desa Kejapanan.

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Kepentingan
1.	Randy Saputro S.E	Kepala Desa	Merupakan pembuat keputusan saat ini
2.	As'ary Chahyani S.H	Sekertaris Desa	Merupakan perangkat desa yang mengetahui tentang relokasi pasar desa Kejapanan
3.	Pak Askan	Pedagang	Merupakan pedagang pasar desa yang menolak adanya relokasi
4.	Pak Suprabto	Aktor	Merupakan salah satu penasehat

		Ekonomi	paguyuban pedagang dan menolak adanya relokasi pasar
5.	Pak Zaenal	Tokoh Agama	Merupakan salah satu penasehat paguyuban pedagang dan menolak adanya relokasi pasar
5.	Pak Saminu	Kepala Pasar	Merupakan salah satu pedagang yang menyetujui adanya relokasi pasar
6.	Bu Kaluk	Pedagang	Pedagang pasar yang menolak relokasi pasar

1.6.3 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti akan meneliti di desa Kejapanan. Mengingat rencana relokasi pasar baru berada di desa Kejapanan, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

1.6.4 Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian kualitatif informan merupakan subjek yang akan memberikan data atau informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik yang digunakan untuk menarik atau memilih informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yang mana dapat diartikan sebagai penarikan informan yang dipilih oleh peneliti karena telah mengetahui siapa dan apa kontribusi informan dalam permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

1.6.5 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, dengan cara mengadakan wawancara langsung dan observasi langsung pada lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen yang ada di desa Kejapanan, sumber data sekunder dapat diperoleh dari data-data lainnya.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala dengan tujuan pengamatan dan pencatatan. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang penting. Peneliti mengawali langkah observasi pertama-tama dengan mengamati secara langsung ke objek yang diteliti, hal ini dilakukan supaya peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitiannya secara lengkap, dalam kegiatan observasi peneliti juga mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas masyarakat guna memahami tentang lokasi penelitian. Peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa Kejapanan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara. Pedoman wawancara biasanya berisikan tentang garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Alasan peneliti tidak menggunakan teknik wawancara yang terstruktur adalah untuk mendukung situasi yang ada sehingga terkesan wajar.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain melalui subjek. Dokumentasi sendiri merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan⁸. Dengan metode ini peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, seperti gambaran umum, struktur organisasi, foto-foto dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapat saat melakukan observasi.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang terpenting dalam melakukan suatu penelitian, sebab analisis data akan mengungkapkan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam bentuk pendapat, rumusan-rumusan dan hukum yang sudah ada. Adapun yang mengenai metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang mana akan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang muncul dengan objektif yang berkaitan dengan dinamika politik dalam relokasi pasar baru desa Kejapanan.

Urutan teknik analisis data adalah

1. Pemeriksaan data yang sudah terkumpul

⁸ Haris Herdiansyah, Metodologi penelitian kualitatif hlm 143

Data yang sudah terkumpul akan digunakan untuk melihat apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan benar atau salah, apabila ternyata data yang ada kurang lengkap maka peneliti akan melengkapi data tersebut.

2. Pengelolaan data

Data yang sudah terkumpul dan dapat dipastikan sudah lengkap akan dipilah-pilah sesuai dengan kategori masing-masing.

3. Analisa dan interpretasi data

Data yang sudah terkumpul dan telah digolongkan pada kategorinya kemudian dianalisis dan diinterpretasikannya.